

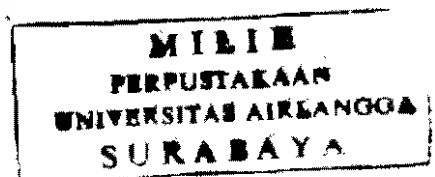
SKRIPSI

DELTA TAMTAMA

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN LISENSI PATEN



Kk.
Tang. 4/99
Tamu
P.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

1999

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN LISENSI PATEN

SKRIPSI

DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM

KK

Das. 4/99

Tam

p.



Pembimbing.

Penyusun.

H. A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.
NIP. 130 325 843

Delta Tamtama
NIM. 039514170

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**
1999

**Telah Dhuji di Hadapan Tim Penguji Skripsi
Pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 1999**

Tim Penguji Skripsi :

1. Ketua : H. Samzari Boentoro, S.H.

2. Anggota : 1. H. A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.

2. Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.

3. Sri Woelan Azis, S.H.

4. Rahmi Jened, S.H., M.H.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kebebasan dalam membuat kontrak yang tidak terbatas dapat menciptakan ketidakadilan apabila para pihak mempunyai kedudukan yang tidak seimbang, karena perjanjian pemberian lisensi paten yang dihasilkan adalah perjanjian yang berat sebelah dan mengandung klausul-klausul yang memberatkan pihak yang lemah.
- b. Ketentuan mengenai lisensi paten diatur dalam bagian kedua pasal 76 - pasal 80 UU No. 6/1989 jo UU No. 13/1997. Tetapi ketentuan ini belum menguraikan secara rinci tentang perjanjian lisensi paten, terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak. Jadi uraian pasal tentang lisensi harus diatur lebih rinci untuk menghindarkan timbulnya masalah-masalah diantara para pihak yang terlibat dalam perjanjian pemberian lisensi paten.
- c. Pasal 78 UU Paten bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari perjanjian pemberian lisensi paten yang akan merugikan penerima lisensi paten domestik dan perekonomian nasional. Namun ruang lingkup pasal ini tidak terperinci, sehingga dapat menimbulkan interpretasi oleh pemberi lisensi paten maupun kantor Paten.

2. Saran

- a. Mengingat perjanjian pemberian lisensi paten sudah banyak dipakai kalangan bisnis Indonesia dan banyak menciptakan ketidakadilan, maka pemerintah Indonesia diharapkan segera mengeluarkan peraturan pemerintah seperti yang dijanjikan oleh pasal 80 UU Paten.
- b. Sambil menunggu PP tersebut diundangkan, seharusnya Kantor Paten segera mengeluarkan ketentuan sendiri yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan apakah perjanjian pemberian lisensi paten memuat klausula yang merugikan penerima lisensi domestik dan perekonomian nasional atau tidak.
- c. Penegakan hukum paten hendaknya dilakukan secara serius dan konsisten, agar dapat dihindarkan terjadinya kerugian bagi pihak penerima lisensi paten pada khususnya dan konsumen pada umumnya.